
PENGARUH BELANJA DAERAH, PENDAPATAN ASLI DAERAH, PERTUMBUHAN EKONOMI, JUMLAH PENDUDUK TERHADAP KEMISKINAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017-2020 (Studi Kasus 35 Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah)

Vidya Arsyani¹, Muhammad Yusuf², Usamah³, Khoirul Fatah⁴

^{1,2,3,4}*Program Studi Akuntansi FEB Universitas Muhammadiyah Pekajangan
Pekalongan*

Korespondensi : izamu65@yahoo.com

Diterima : Saebani, Tanggal : 15 Oktober 2023, Direvisi : Saebani, Tanggal : 20 Oktober 2023, Disetujui : Tutut Dwi Andayani, Tanggal 12 November 2023

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh belanja daerah, pendapatan asli daerah, pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk terhadap kemiskinan, baik secara parsial maupun simultan. Populasi dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sumber data sekunder yang diperoleh melalui Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 35. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah sampling jenuh. Metode analisis data dengan menggunakan analisis linear berganda dan menggunakan alat bantu aplikasi SPSS Statistics 25. Hasil analisis data pada penelitian ini menyimpulkan bahwa belanja daerah, pendapatan asli daerah, jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi dapat diketahui bahwa kemiskinan dapat dijelaskan sebesar 73,1% oleh variabel independen dalam penelitian ini.

Kata kunci : Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk.

The Effect of Regional Expenditure, Local Own-Source Revenue, Economic Growth, and Total Population on Poverty at District/City Government of Central Java Province 2017-2020 (A Case Study on 35 Districts/Cities of Central Java Province)

ABSTRACT

The study aims to obtain the empirical evidence about the effect of effect of regional expenditure, local own-source revenue, economic growth, and total population on poverty, either partially or simultaneously. The population applied quantitative approach with the secondary data source obtained from Central Bureau of Statistics of Central Java. The samples are thirty-five District/City Governments of Central Java with saturated sampling as the technique. Meanwhile, data analysis method used multiple linear analysis and the SPSS Statistics 25 application tool. The 1 analysis result stated that regional expenditure, local own-source revenue, and economic growth

significantly affected on the poverty. Otherwise, the economic growth has no significant effect on the poverty. Based on the determination coefficient test result, it stated that the poverty is explained 73,1% by the independent variable in this study.

Keywords: *regional expenditure, local own-source revenue, economic growth, total population.*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara berkembang di dunia di mana tingkat kemiskinan dan pengangguran masih cukup tinggi, hal tersebut menjadi problematika baik di lingkup pemerintahan maupun di lingkup masyarakat itu sendiri (Riswan et al., 2017). Masalah kemiskinan sering kali menjadi salah satu penyakit dalam perekonomian di Indonesia maupun diberbagai negara didunia, sehingga harus disembuhkan atau paling tidak dikurangi. Menurut Badan Pusat statistik (BPS) kemiskinan merupakan ketidakmampuan untuk memehuni kebutuhan dasar minimum, termasuk kebutuhan pangan, maupun kebutuhan non pangan, dengan memperhatikan konsep daya tampung dan pendekatan obat dasar dalam buku pegangan tentang kemiskinan dan ketimpangan. Sedangkan di sisi lain, kondisi kebutuhan manusia terus meningkat di mana seharusnya aktivitas perekonomian pun juga ikut meningkat (Kholidah et al., 2019).

Kondisi ekonomi masyarakat yang tidak bergairah dapat meningkatkan angka kemiskinan, bahkan sebagian besar masyarakat yang mengalami penurunan bahkan kehilangan sumber pendapatan (Kholidah dan Hakim, 2021). Padahal, kondisi perekonomian yang tumbuh stabil merupakan faktor utama dalam keberhasilan pembangunan masyarakat (Azzahra et al., 2023). Fenomena kemiskinan semakin erat dengan konsep dan menimbulkan permasalahan ketidakadilan, kekerasan, disintegrasi dimana suatu keadaan yang tidak bisa bersatu dan menghilangnya keutuhan serta menyebabkan perpecahan antara masyarakat.

Berdasarkan data yang ada di lapangan dapat dengan mudah ditemukan sebagian masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan dari total penduduk lebih dari 267 juta jiwa (Kholidah dan Salma, 2019). Kemiskinan pada Provinsi Jawa Tengah pada 2017 tercatat mengalami penurunan jumlah penduduk miskin hingga 12,23 persen. Menurut Dadang Soematri Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Tengah, mengatakan keseluruhan penduduk miskin yang pada maret 2017 berjumlah 4.450.720 orang, namun per September 2017 berkurang menjadi 4.197.490 orang. Penurunan angka kemiskinan ini disebabkan oleh peran komoditi makanan yang mencapai 73,38 persen dan untuk komoditi non pangan antara lain perumahan, air, listrik, pendidikan, dan perlengkapan mandi.

Dari posisi september 2018, angka kemiskinan menurun sebesar 11,32 persen dengan jumlah penduduk miskin 3,89 juta orang. Berdasarkan Badan Pusat Statistik Jawa Tengah per maret 2019, jumlah penduduk miskin 3,74 juta orang dengan tingkat kemiskinan di Jawa Tengah mencapai 10,8 persen. Pada September 2020 jumlah kemiskinan naik sebesar 11,84 persen atau 4,12 juta

orang. Namun persentase itu masih di bawah rata-rata nasional sebesar 10,19 persen dari per september 2020. Untuk menekan angka kemiskinan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan berfokus pada pengembangan infrastruktur pada zona merah.

Wilayah-wilayah Kabupaten yang menjadi zona merah atau dengan angka kemiskinan tertinggi adalah Kabupaten Brebes, Banyumas, Kebumen, Pemalang, dan Cilacap. Jika dilihat dari wilayah daerah memiliki potensi ekonomi yang besar, namun pada pertumbuhannya kurang berkualitas. Akibatnya tingkat kemiskinan dan kesenjangan ekonomi semakin tinggi, hal ini ditunjukkan dengan indeks gini ratio yang masih tinggi. Kemiskinan di Indonesia kini bertambah pesat. Padahal sebelumnya angka kemiskinan terus berkurang. Beberapa Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah juga memiliki jumlah penduduk miskin yang terbanyak diatas rata rata nasional pada Badan Pusat Statistik sebagai berikut :

Tabel 1 Jumlah Kemiskinan tahun 2017-2020

NO	NAMA KABUPATEN / KOTA	JUMLAH KEMISKINAN (Ribuan Jiwa)			
		2017	2018	2019	2020
1	Kabupaten Cilacap	238.30	193.20	185.20	198.60
2	Kabupaten Banyumas	283.20	226.20	211.60	225.84
3	Kabupaten Kebumen	233.40	208.70	201.30	211.09
4	Kabupaten Pemalang	225.00	208.30	200.70	209.03
5	Kabupaten Brebes	343.50	309.20	293.20	308.78

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa jumlah penduduk miskin pada (2017-2020) yang termasuk dalam kategori jumlah penduduk miskin tertinggi diatas rata-rata nasional pada Provinsi Jawa Tengah yaitu Kabupaten Brebes jumlah kemiskinan sebesar 308,780 jiwa atau setara dengan 17,03 persen. Kabupaten banyumas dengan jumlah kemiskinan sebesar 225,84 jiwa atau setara 13,26 persen. Kabupaten Kebumen jumlah kemiskinan sebesar 211,09 jiwa atau setara dengan 17,59 persen. Kabupaten Pemalang jumlah kemiskinan sebesar 209,003 atau setara dengan 16,02 persen. Kabupaten Cilacap jumlah kemiskinan sebesar 198.60 atau setara dengan 11,46 persen.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan, Belanja Daerah adalah semua pengeluaran yang berasal dari rekening kas daerah yang mengurangi ekuitas dan dana lancar yang diakui sebagai kekayaan bersih. Berikut sajian data belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah :

Tabel 2 Realisasi Belanja Daerah

NO	NAMA KABUPATEN / KOTA	REALISASI BELANJA DAERAH (Dalam Ribuan Rupiah)			
		2017	2018	2019	2020
1	Kota Semarang	Rp4,782,714	Rp4,506,407	Rp4,776,442	Rp5,319,832
2	Kabupaten Banyumas	Rp3,610,994	Rp3,319,060	Rp3,725,271	Rp3,773,568
3	Kabupaten Cilacap	Rp3,265,399	Rp3,260,826	Rp3,584,962	Rp3,219,631

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

Dari Tabel 2 dapat dilihat bahwa pada (2017-2020) Belanja Daerah terus mengalami peningkatan diantara Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan target rata-rata anggaran belanja Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp82,35 triliun. Realisasi belanja daerah pada Kota Semarang menempati posisi pertama sebesar Rp5.319.832.790. yang selanjutnya ada pada Kabupaten Banyumas sebesar Rp3.773.568.764. dan pada Kabupaten Cilacap sebesar Rp3.0219.631.963.

Beberapa Kabupaten atau Kota mengalami kenaikan atau penurunan dikarenakan surplus/ defisit dan pembiayaan neto naik dari anggaran (SILPA). Pengeluaran dari belanja tidak langsung yang digunakan untuk pembiayaan terkait dengan penanganan kasus pandemi covid-19 akibatnya anggaran belanja tidak langsung membengkak.

Menurut Undang-undang nomer 33 tahun 2004 pasal 6, sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari, pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Berikut tabel Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah :

Tabel 3 Realisasi Pendapatan Asli Daerah

NO	NAMA KABUPATEN / KOTA	REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAAH			
		2017	2018	2019	2020
1	Kab Demak	Rp2,060,864,407	Rp2,143,306,259	Rp2,184,187,681	Rp2,302,405,766
2	Kota Semarang	Rp1,791,886,379	Rp1,821,274,103	Rp2,159,409,774	Rp2,516,646,593
3	Kab Banyumas	Rp619,701,628	Rp648,326,914	Rp636,507,460	Rp729,892,819
4	Kota Surakarta	Rp527,544,225	Rp525,125,555	Rp544,781,462	Rp303,178,239
5	Kab Tegal	Rp375,531,165	Rp372,282,676	Rp416,867,970	Rp450,745,220

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

Dari tabel 3 pada 2017-2020 pendapatan asli daerah lebih besar diantara Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Pendapatan asli daerah yang lebih besar dan cenderung mengalami peningkatan secara terus menerus yaitu Kabupaten Cilacap dengan pendapatan asli daerah sebesar Rp. 2,959,272,074. Kota Semarang dengan pendapatan asli daerah sebesar Rp.2,516,646,593. Kabupaten Demak dengan pendapatan asli daerah sebesar Rp.2,302,405,766. Kabupaten Banyumas dengan Rp.729.892,819.

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu perkembangan dalam kegiatan perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan untuk meningkatkan kemakmuran (sukirno 2011). Berikut sajian data pertumbuhan ekonomi :

Tabel 4 Laju Pertumbuhan Ekonomi

NO	NAMA KABUPATEN / KOTA	PERTUMBUHAN EKONOMI			
		2017	2018	2019	2020
1	Kota Semarang	6.70	6.48	6.81	-1.85
2	Kabupaten Banyumas	6.34	6.45	6.32	-1.65
3	Kabupaten Jepara	5.39	5.85	6.02	-1.92
4	Kabupaten Pekalongan	5.35	-1.89	5.44	5.76

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

Dari tabel 4 pencapaian pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah yang memiliki rata-rata 5,66 persen. Kabupaten/Kota yang dalam pencapaiannya melebihi rata-rata rata Provinsi Jawa Tengah diantaranya pada Kota Semarang yang terus mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi pada (2017-2019) sebesar 6,81 persen. Selanjutnya pada Kabupaten Banyumas yang juga mengalami peningkatan (2017-2020) sebesar 6,32 persen. Kabupaten Jepara yang juga mengalami peningkatan (2017-2020) sebesar 6,02 persen. Untuk tahun 2020 pertumbuhan ekonomi hampir semua mengalami penurunan hingga minus kecuali pada Kabupaten Pekalongan yang meningkat diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa tengah sebesar 5,76 persen.

Jumlah penduduk suatu negara selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu karena pertumbuhan penduduk pada wilayah tersebut (Jony Purba, 2017). Jumlah penduduk di Indonesia kini bertambah pesat. Secara Pemerintahan pada Pemerintahan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah juga memiliki jumlah penduduk yang tercatat pada Badan Pusat Statistik sebagai berikut :

Tabel 5 Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah

NO	NAMA KABUPATEN / KOTA	JUMLAH KEMISKINAN (Dalam Ribuan Jiwa)			
		2017	2018	2019	2020
1	Kabupaten Brebes	343.50	309.20	293.20	308.78
2	Kota Semarang	80.90	73.60	72.00	79.58
3	Kabupaten Cilacap	238.30	193.20	185.20	198.60
4	Kabupaten Banyumas	283.20	226.20	211.60	225.84
5	Kabupaten Tegal	141.80	114.10	109.90	117.50

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

Dari data 5 berdasarkan sensus penduduk tahun 2017-2020 dari jumlah penduduk di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 36,52 juta jiwa Kabupaten Brebes menjadi peringkat pertama yang memiliki jumlah penduduk sebesar 1,978,759 juta jiwa. Yang kedua ada Kabupaten Cilacap dengan jumlah penduduk sebesar 1,944,857 juta jiwa. Yang seterusnya ada Kabupaten Banyumas sebesar 1,776,918 juta jiwa. Yang keempat ada Kota Semarang sebesar 1,653,524.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Pendekatan pada penelitian ini yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Menurut Ezmir 2009 kuantitatif adalah suatu pendekatan yang secara pokok menggunakan *postpositivist* dalam mengembangkan ilmu pengetahuan misalnya saja digunakan untuk hubungan yang berkaitan dengan sebab akibat, reduksi kepada variabel, hipotesis serta spesifik dengan pengamatan, pengukuran serta uji teori, strategi penelitian strategi berbentuk

survei ataupun eksperimen yang memerlukan data statistik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel.

Populasi dan Sampel

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang memiliki nilai, karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian untuk diambil kesimpulannya (Sugiyono, 2008). Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Jumlah Penduduk, Jumlah Penduduk Miskin, dan juga Laporan Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto. Jumlah populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh data laporan yang ada pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sampling jenuh. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Jumlah Penduduk, Jumlah Penduduk Miskin, dan juga Laporan Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto, pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2020.

Teknik Analisis Data

Metode analisis menggunakan statistik deskriptif, teknik analisis linear regresi berganda, uji asumsi klasik, dan menggunakan pengujian hipotesis yang diolah dan data akan ditransformasikan atau dilog dalam satuan yang sama.

Statistik Deskriptif

Menurut Gozali tahun 2016, statistik deskriptif yaitu mendeskripsikan data menjadi sebuah informasi yang mudah untuk dipahami.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Populasi dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa tengah. Semua anggota populasi menjadi sampel. Data yang digunakan dalam penelitian yang bersumber dari web site Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, mencakup jumlah penduduk miskin, laporan realisasi anggaran pendapatan belanja daerah, laporan produk domestik regional bruto, jumlah penduduk pada tahun 2017 sampai 2020. Berikut daftar Kabupaten/Kota pada Pemerintah Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah sebagai data penelitian :

Tabel 6 Data Sampel Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Tengah

NO	NAMA KABUPATEN / KOTA	NO	NAMA KABUPATEN / Kota
1	Kabupaten Cilacap	19	Kabupaten Kudus
2	Kabupaten Banyumas	20	Kabupaten Jepara
3	Kabupaten Purbalingga	21	Kabupaten Demak
4	Kabupaten Banjarnegara	22	Kabupaten Semarang

5	Kabupaten Kebumen	23	Kabupaten Temanggung
6	Kabupaten Purworejo	24	Kabupaten Kendal
7	Kabupaten Wonosobo	25	Kabupaten Batang
8	Kabupaten Magelang	26	Kabupaten Pekalongan
9	Kabupaten Boyolali	27	Kabupaten Pemalang
10	Kabupaten Klaten	28	Kabupaten Tegal
11	Kabupaten Sukoharjo	29	Kabupaten Brebes
12	Kabupaten Wonogiri	30	Kota Magelang
13	Kabupaten Karanganyar	31	Kota Surakarta
14	Kabupaten Sragen	32	Kota Salatiga
15	Kabupaten Grobogan	33	Kota Semarang
16	Kabupaten Blora	34	Kota Pekalongan
17	Kabupaten Rembang	35	Kota Tegal
18	Kabupaten Pati		

Sumber : data Sekunder (2022)

Berdasarkan tabel 6, dapat diketahui bahwa seluruh daerah di 35 Kabupaten/Kota menjadi sampel. Pada setiap Kabupaten/Kota diambil dari data 4 tahun yaitu tahun 2017 sampai dengan 2020. Sehingga total sampel yang digunakan adalah $35 \times 4 = 140$.

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 7 Hasil Uji Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kemiskinan	140	6.81	10.44	9.1182	.79962
Belanja Daerah	140	20.60	22.39	21.5294	.34051
Pendapatan Asli Daerah	140	19.00	21.81	19.7366	.54063
Pertumbuhan Ekonomi	140	.00	2.99	1.6504	.50669
Jumlah Penduduk	140	11.71	17.36	13.7174	.71676
Valid N (listwise)	140				

Sumber : Data diolah spss

Melihat dari hasil pada tabel 7 statistik deskriptif bahwa antara mean dan standar deviation lebih besar nilai mean. Jadi menunjukkan bahwa data tersebut berdistribusi normal.

Pengujian Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 8 Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		140
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.40867629
Most Extreme Differences	Absolute	.089

	Positive		.044
	Negative		-.089
Test Statistic			.089
Asymp. Sig. (2-tailed)			.009 ^c
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.		.207 ^d
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.196
		Upper Bound	.217
a. Test distribution is Normal.			
b. Calculated from data.			
c. Lilliefors Significance Correction.			
d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000.			

Sumber : data diolah spss

Pada tabel 8 menunjukkan bahwa nilai Monte Carlo (Sig. 2-tailed) sebesar $0.207 > 0.05$. Jadi dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 9 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-21.105	3.053		-6.914	.000		
	Belanja Daerah	1.365	.203	.581	6.740	.000	.260	3.845
	Pendapatan Asli Daerah	-.267	.079	-.180	-3.391	.001	.683	1.463
	Pertumbuhan Ekonomi	-.011	.070	-.007	-.161	.872	.991	1.009
	Jumlah Penduduk	.446	.088	.400	5.074	.000	.312	3.209

a. Dependent Variable: Kemiskinan

Sumber : Data diolah spss

Berdasarkan dari tabel 9 hasil dari uji multikolinearitas, dilihat dari nilai tolerance $> 0,10$ yaitu untuk variabel Belanja Daerah sebesar 0.260, Pendapatan Asli Daerah sebesar 0.683, Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0.991, Jumlah Penduduk sebesar 0.312. Dan VIF < 10 untuk variabel untuk variabel Belanja Daerah sebesar 3.845, Pendapatan Asli Daerah 1.463, dan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 1.009, dan Jumlah Penduduk sebesar 3.209. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi adanya gejala multikolinearitas dalam model regresi yang digunakan.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 10 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Correlations

			Belanja Daerah	Pendapatan Asli Daerah	Pertumbuhan Ekonomi	Jumlah Penduduk	Unstandardized Residual
Spearman's rho	Belanja Daerah	Correlation Coefficient	1.000	.636	-.054	.891	-.039
		Sig. (2-tailed)	.	.000	.528	.000	.647
		N	140	140	140	140	140

Pendapatan Asli Daerah	Correlation Coefficient	.636**	1.000	-.083	.639**	.005
	Sig. (2-tailed)	.000	.	.331	.000	.952
	N	140	140	140	140	140
Pertumbuhan Ekonomi	Correlation Coefficient	-.054	-.083	1.000	-.013	.043
	Sig. (2-tailed)	.528	.331	.	.883	.615
	N	140	140	140	140	140
Jumlah Penduduk	Correlation Coefficient	.891**	.639**	-.013	1.000	.100
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.883	.	.241
	N	140	140	140	140	140
Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	-.039	.005	.043	.100	1.000
	Sig. (2-tailed)	.647	.952	.615	.241	.
	N	140	140	140	140	140

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber : Data diolah Spss

Dari Output Korelasi 10 maka dapat disimpulkan sebagai berikut bahwa, nilai signifikansi sebesar $0,05 >$ nilai korelasi antara belanja daerah dengan *unstandardized residual* menghasilkan nilai korelasi 0.647, Pendapatan Asli Daerah menghasilkan nilai signifikansi 0.952. Sedangkan untuk korelasi dengan Pertumbuhan Ekonomi menghasilkan nilai signifikansi 0.615 dan untuk Jumlah Penduduk menghasilkan nilai 0.241. Pada model regresi diatas tidak ditemukan adanya gejala heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Tabel 11 Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.860 ^a	.739	.731	.41469	2.026

a. Predictors: (Constant), Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah
b. Dependent Variable: Kemiskinan

Sumber : Data diolah spss

Dari hasil analisis diatas jika diketahui Durbin-Watson (DW) $DU < DW < 4-DU$ yaitu $1,7988 < 2,026 < 2,2012$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi ini tidak terdapat autokorelasi.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 12 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-21.105	3.053		-6.914	.000
	Belanja Daerah	1.365	.203	.581	6.740	.000
	Pendapatan Asli Daerah	-.267	.079	-.180	-3.391	.001
	Pertumbuhan Ekonomi	-.011	.070	-.007	-.161	.872
	Jumlah Penduduk	.446	.088	.400	5.074	.000

a. Dependent Variable: Kemiskinan

Sumber : data diolah spss

Uji Simultan (Uji F)

Tabel 14 Hasil Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	65.661	4	16.415	95.456	.000 ^b
	Residual	23.215	135	.172		
	Total	88.876	139			

a. Dependent Variable: Kemiskinan

b. Predictors: (Constant), Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah

Sumber : diolah spss

Berdasarkan hasil pengujian 14 dapat dikatakan bahwa, dapat diketahui F tabel dengan tingkat signifikansi 0,05. Dari hasil uji Anova atau F test menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar $0.000 < 0,05$. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa hipotesis H5, belanja daerah, pendapatan asli daerah, pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, **berpengaruh** terhadap kemiskinan atau dapat diterima

Koefisien Determinasi

Tabel 15 Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.860 ^a	.739	.731	.41469

a. Predictors: (Constant), Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah

b. Dependent Variable: Kemiskinan

Sumber : data diolah

Dari tabel 4.15 analisis nilai koefisien determinasi sebesar 0,731 atau 73,1%. Hal itu berarti Variasi Kemiskinan dapat dijelaskan oleh variasi dari keempat variabel independent yaitu Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, dan Jumlah Penduduk sebesar 73,1%. Sisanya sebesar 26,9% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model yang tidak dijelaskan, seperti belanja modal, dana perimbangan, pendapatan perkapita, dan pengangguran.

PEMBAHASAN

Pengaruh belanja daerah terhadap kemiskinan

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pada diperoleh, dengan nilai signifikansi t sebesar $0,000 < 0,05$ dengan nilai $t_{hitung} 6,740 > 1,655$ yang berarti belanja daerah secara parsial **berpengaruh signifikan** terhadap kemiskinan, sehingga hipotesis pertama (H1) dalam penelitian ini dapat **diterima**.

Dalam penelitian ini Belanja Daerah terus mengalami peningkatan akan tetapi kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017-2020 juga mengalami peningkatan,

dikarenakan belanja daerah yang digunakan melalui belanja modal untuk menngurangi kemiskinan besarnya relatif masih kecil dibandingkan dengan belanja pegawai yang relatif besar. Berdasarkan penjelasan diatas dapat didukung dengan sajian data sebagai berikut :

Tabel 16 Sampel Realisasi Belanja Pegawai dan Belanja Modal

NO	NAMA KABUPATEN / KOTA	Belanja Pegawai (%)		Belanja Modal (%)	
		2019	2020	2019	2020
1	Kabupaten Purworejo	95,15	95,29	82,76	86,78
2	Kabupaten Sukoharjo	89,90	92,83	65,58	80,11
3	Kabupaten Temanggung	92.40	96,29	84,45	84,56

Dapat dilihat dari tabel 16 realisasi belanja pegawai pada tahun 2019 perbandingan antara belanja modal dan belanja pegawai pada Kabupaten Purworejo sebesar 9,39%, untuk Kabupaten Sukoharjo sebesar 24,32%, sedangkan Untuk Kabupaten Temanggung sebesar 7,95%. Pada tahun 2020 perbandingan antara belanja modal dan belanja pegawai pada Kabupaten Purworejo sebesar 8,51%, untuk Kabupaten Sukoharjo sebesar 12,72%, sedangkan Untuk Kabupaten Temanggung sebesar 11,73%. Berikut sajian belanja daerah dan kemiskinan pada Provinsi Jawa Tengah :

Tabel 17 Realisasi Belanja Daerah dan Kemiskinan

NO	NAMA KABUPATEN / KOTA	Belanja Daereh (dalam ribuan rupiah)		Kemiskinan (dalam ribuan jiwa)	
		2019	2020	2019	2020
1	Kabupaten Purworejo	Rp2,282,729	Rp2,483,287	97.90	103.73
2	Kabupaten Sukoharjo	Rp2,143,687	Rp2,401,529	63,6	68.89
3	Kabupaten Temanggung	Rp1,969,512	Rp1,996,489	72.60	77.33

Berdasarkan tabel 17 realisasi belanja daerah pada Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019-2020 diketahui 3 daerah Kabupaten/Kota yang mengalami peningkatan Belanja Daerah dan Kemiskinan yaitu Kabupaten Purworejo, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Temanggung.

Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa besarnya belanja daerah disetiap Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah ketika belanja yang digunakan lebih besar untuk belanja pegawai secara rutin. Sedangkan besaran belanja daerah yang bertujuan untuk memberdayakan ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan masih relatif kecil maka akan meningkatkan kemiskinan. begitu juga sebaliknya ketika besaran belanja pegawai yang digunakan secara rutin itu kecil dibandingkan dengan besaran yang digunakan untuk memberdayakan kemiskinan maka akan mengurangi kemiskinan.

Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Riko Tri Fasholla (2018), hal ini sejalan dengan penelitian Putra Alfi Ramadhan (2019), mengemukakan hasil penelitiannya adalah

belanja daerah berpengaruh signifikan terhadap jumlah kemiskinan. Hal ini juga selaras dengan penelitian penelitian yang dilakukan oleh Lista Sudarmanto, Dessy Herlisnawati (2019), Rizky Airy Putri dkk (2021) dan Azmi Nasution (2021) menyatakan bahwa belanja daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada kabupaten Bogor.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemiskinan

Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pada tabel, diperoleh nilai signifikansi $0,001 < 0,05$. Dengan demikian artinya bahwa pendapatan asli daerah secara parsial **berpengaruh signifikan** terhadap kemiskinan, sehingga hipotesis kedua (H2) dalam penelitian ini dapat **diterima**.

Dapat dilihat pada periode ini pengamatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan. Kontribusi pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 hampir semua mengalami peningkatan pendapatan asli daerah artinya bahwa Pemerintah Kabupaten /Kota di Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah beberapa sudah dapat menjalankan otonomi daerah dan tidak bergantung secara mutlak. Penjelasan diatas didukung dengan sajian data sebagai berikut :

Tabel 18 Sampel Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Kemiskinan

No	Nama Kota / Kabupaten	Realisasi Pendapatan Asli Daerah		Kemiskinan (Ribuan Jiwa)	
		2018	2019	2018	2019
1	Kabupaten Cilacap	Rp497,353,613	Rp500,332,718	193.20	185.20
2	Kota Surakarta	Rp525,125,555	Rp544,781,462	47.00	45.20
3	Kabupaten Kebumen	Rp351,965,057	Rp401,172,210	208.70	201.30
4	Kabupaten Tegal	Rp372,282,676	Rp416,867,970	83.50	82.20
5	Kabupaten Pekalongan	Rp311,288,144	Rp391,254,587	89.50	87.00

Dapat dilihat dari tabel 4.18. bahwa realisasi pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa tengah tahun 2018-2019 hampir semua mengalami kenaikan seperti Kabupaten Cilacap, Kota Surakarta, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Tegal, dan Kota Surakarta. Dan untuk Kemiskinan pada Kabupaten Cilacap, Kota Surakarta, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Tegal, dan Kota Surakarta juga ikut mengalami penurunan pada tahun 2018-2019.

Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa kemandirian suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan asli daerah dibutuhkan untuk mengurangi kemiskinan. Kemandirian daerah diukur dari pendapatan asli daerah yang bersumber pada pajak daerah, retribusi daerah, hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan asli daerah yang tinggi akan mempengaruhi pembangunan dan perkembangan di daerah yang direalisasikan melalui bentuk pengadaan fasilitas, sarana dan prasarana yang ditujukan untuk kepentingan publik yang nantinya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan mengurangi kemiskinan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Atika Nur Oktarini (2018) dan Dewi Chrisanty paat dkk (2019), Nur Ika Fitriyanti Herniawati (2020), Rulan L Manduapessy (2020) dan Suryani Yuli dkk (2021) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pada tabel, diperoleh nilai signifikansi $0,872 > 0,05$, pertumbuhan ekonomi secara parsial **tidak berpengaruh signifikan** terhadap kemiskinan, sehingga hipotesis ketiga (H3) dalam penelitian ini **ditolak**.

Dari hasil diatas menunjukkan pertumbuhan ekonomi belum mampu untuk mengentaskan kemiskinan dikarenakan sarana dan prasarana, infrastruktur pada daerah daerah yang masih terpencil masih belum maksimal. Pada periode 2017-2019 pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah cenderung mengalami penurunan, dan pada tabel jumlah penduduk miskin pada periode 2017-2018 juga terus mengalami peningkatan jumlah penduduk miskin. Namun pada periode 2019-2020 pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan yang sangat drastis pada kuartal 3 hingga minus 3,92 persen, dan menyebabkan angka jumlah penduduk miskin pada tahun 2020 mengalami penurunan yang drastis dari tahun sebelumnya yang sudah mengalami penurunan. Dari uraian diatas didukung dengan data sebagai berikut :

Tabel 19 Sampel Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan

NO	NAMA KABUPATEN / KOTA	Pertumbuhan Ekonomi (%)		Kemiskinan (Ribuan Jiwa)	
		2017	2018	2017	2018
1	Kabupaten Pati	5.67	5.71	123.9	119
2	Kabupaten Banyumas	6.34	6.45	226.2	211.6
3	Kabupaten Cilacap	2.27	2.99	193.2	185.2
4	Kabupaten Kudus	3.09	3.24	60.00	58.00
5	Kabupaten Pemalang	5.61	5.69	208.3	200.7
6	Kabupaten Pekalongan	5.44	5.76	87.00	91.86

Dapat dilihat dari tabel 4.19. bahwa Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa tengah tahun 2018-2019 untuk Kabupaten Pati, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kudus, Kabupaten Pemalang mengalami peningkatan. Untuk jumlah kemiskinan pada jumlah kemiskinan ini mengalami penurunan pada Kabupaten Pati, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kudus, Kabupaten Pemalang.

Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa pada tingkat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah belum mampu untuk mengurangi kemiskinan. Dengan kata lain ketika pertumbuhan ekonomi suatu daerah mengalami peningkatan maka akan menurunkan kemiskinan. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah perlu memacu insfrastruktur, sarana dan prasarana yang memungkinkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan secara berkelanjutan agar kemiskinan dapat dikurangi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ambok pangiuk (2018) dan Elvani dkk (2018) mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Putra Alfi Ramadhan (2019), Dewi Chrisanty Paat dkk (2019) dan Deysy Lendentariang (2019). Rapika Kesetriarini (2020) mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan.

Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan.

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah jumlah berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pada tabel, diperoleh nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, jumlah penduduk secara parsial **berpengaruh signifikan** terhadap kemiskinan, sehingga hipotesis pertama (H4) dalam penelitian ini **diterima**.

Hal ini didukung dengan Jumlah penduduk Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Tengah yang setiap tahunnya terus meningkat, dan pada data kemiskinan juga terus meningkat. Jumlah penduduk pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah meningkat dikarenakan tingkat angka kelahiran yang berkembang jauh lebih cepat atau mengalami kenaikan signifikan dibandingkan dengan hasil produksi yang akan menyebabkan penduduk kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga akan berimbas pada meningkatnya kemiskinan.

Tabel 20 Sampel Jumlah Penduduk dan Kemiskinan

NO	NAMA KABUPATEN / KOTA	JUMLAH PENDUDUK (Ribuan Jiwa)		Kemiskinan (Ribuan Jiwa)	
		2019	2020	2019	2020
1	Kabupaten Brebes	1.809.096	1.978.759	293.20	308.78
2	Kabupaten Cilacap	1.727.098	1.944.857	185.20	193.20

3	Kabupaten Banyumas	1.693.006	1.776.918	211.60	225.84
4	Kabupaten Tegal	1.440.698	1.596.996	109.90	117.50
5	Kabupaten Pemalang	1.302.813	1.471.489	200.70	209.03

Dapat dilihat dari tabel 4.20. bahwa Jumlah penduduk pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa tengah tahun 2019-2020 hampir semua mengalami kenaikan untuk Kabupaten Brebes, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Pemalang. Untuk jumlah kemiskinan mengalami kenaikan.

Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa semakin banyak jumlah penduduk, maka akan semakin banyak jumlah kemiskinan jika tidak diimbangi dengan fasilitas yang dapat meningkatkan hasil produksi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Riko Tri Fashollah (2018), Elda Wahyu Azizah dkk (2018). Iqmalia Adella (2019) dan Deysy Lendatariang (2019). Rapika Kesetriani dan Selna Aprillia Sidauruk (2020) yang mengatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan.

Pengaruh Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk Berpengaruh Secara Stimultan Terhadap Kemiskinan.

Hasil pengujian hipotesis 5 bahwa belanja daerah, pendapatan asli daerah, pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk terhadap kemiskinan menunjukkan berpengaruh secara positif. Nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dibandingkan dari 0,05 serta F hitung > F tabel yaitu $95.456 > 2.44$. Sehingga hipotesis yang diajukan ditolak. Selain itu hasil koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilai koefisien deterinasi sebesar 0,731% atau 73,1% yang berarti bahwa variabel independent belanja daerah, pendapatan asli daerah, jumlah penduduk, dapat mempengaruhi variabel dependent sebesar 73,1% dan sisanya sebesar 26,9% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian ini yang tidak dijelaskan seperti belanja modal, dana perimbangan, pendapatan perkapita, dan pengangguran.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan yang dilakukan oleh Riko Tri Fashollah (2018) yang menyatakan hasil bahwa secara stimultan belanja daerah, jumlah penduduk, pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kemiskinan. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan yang dilakukan oleh Putra Alfi Ramadhan (2019) yang menyatakan hasil bahwa secara stimultan belanja daerah, pendapatan asli daerah, pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kemiskinan. Iqmalia Adella (2019) hasil penelitian mengatakan bahwa pendapatan asli daerah, jumlah penduduk secara stimultan berpengaruh terhadap kemiskinan. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan yang dilakukan oleh Lista, Ernadhi Sudarmanto, Dessy Herlisnawati (2019) yang menyatakan hasil bahwa secara stimultan pendapatan asli daerah, belanja daerah, berpengaruh terhadap kemiskinan. Umarudin Usman

dan Diramita (2018) mengatakan bahwa secara simultan jumlah penduduk, pengangguran, pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Hasil Uji t atau parsial menunjukkan bahwa belanja daerah, pendapatan asli daerah, jumlah penduduk berpengaruh terhadap kemiskinan. Sedangkan untuk variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kemiskinan.
2. Hasil uji F menunjukkan bahwa belanja daerah, pendapatan asli pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan. Koefisien determinasi diperoleh nilai *R-Square* sebesar 0,739. Hasil menunjukkan bahwa 73,1% kemiskinan dipengaruhi oleh variabel belanja daerah, pendapatan asli daerah, pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk. Sedangkan untuk sisanya sebesar 26,9% dipengaruhi variabel lain diluar model yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini seperti belanja modal, dana perimbangan, pendapatan perkapita, dan pengangguran.

Keterbatasan

1. Variabel dalam penelitian ini hanya menggunakan 4 variabel independent saja yaitu belanja daerah, pendapatan asli daerah, pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk yang memiliki pengaruh sebesar 73,1% terhadap kemiskinan. Artinya masih ada 26,9% variabel lain yang tidak digunakan didalam penelitian ini yang dapat mempengaruhi kemiskinan seperti belanja modal, dana perimbangan, pendapatan perkapita, dan pengangguran.
2. Adanya perbedaan dalam pengelolaan data dikarenakan aplikasi spss yang saya gunakan versi terbaru yaitu setelah IBM.

Saran dan Implikasi

Saran

1. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel independent lain yang dapat mempengaruhi kemiskinan seperti Jumlah Pengangguran, kinerja keuangan daerah, maupun yang lainnya.
2. Untuk peneliti selanjutnya bisa menambahkan jumlah tahun yang digunakan dalam penelitian.

Implikasi

1. Kepada Pemerintah Daerah perlu adanya aturan yang ketat dari pemerintah dalam mengatur setiap pemasukan pendapatan asli daerah dan pengeluaran belanja daerah, agar setiap pemasukan dan pengeluaran belanja daerah yang digunakan tepat sasaran seperti pembangunan layanan fasilitas pendidikan, kesehatan serta pembangunan infrastruktur yang dapat memadai dan nantinya digunakan untuk kegiatan yang produktif. Dengan langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi jumlah kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

2. Pemerintah daerah juga harus membuat kebijakan dan mengambil peranan yang mendorong dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi yang lebih maju, dengan cara menaikkan kapasitas hasil produksi pada masyarakat agar dapat mengurangi kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah daerah juga harus membuat dan mengambil langkah tegas untuk mengurangi kemiskinan, dengan cara menambah sarana dan prasarana, membangun infrastruktur yang nantinya dapat membuka lapangan kerja dengan luas.

Daftar Pustaka

- Fashollah, R. T. (2018). Pengaruh Belanja Daerah, Jumlah Penduduk, Terhadap Jumlah Kemiskinan di Kabupaten Cilacap Periode Tahun 2011-2016 (Studi Kasus di 24 Kecamatan di Kabupaten Cilacap Periode 2011-2016).
- Iqmalia, A. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Jumlah Penduduk, Dana Perimbangan, dan Belanja Daerah Terhadap Kemiskinan di Sumatera Selatan.
- Ishak, J. F. (2017). Pengaruh Belanja Langsung dan Tidak Langsung Terhadap Kemiskinan. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 55-59.
- Lista lista, E. S. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah Terhadap Tingkat Kemiskinan Pemerintah Kabupaten Bogor Periode 2008-2017. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Akuntansi* 6(3).
- Manduapessy, R. L. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Kabupaten Mimika. *Jurnal Kritis (Kebijakan, Riset dan Inovasi)*, 39-55.
- Ramadhan, P. A. (2019). Pengaruh Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara. *Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Sosial Sains*, 1(01).
- Kholidah, N., & Hakim, M. R. (2021). Analysis of zakat empowerment in the era of pandemy COVID-19 towards impossible material and spiritual aspects Mustahik. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), 1653-1662.
- Riswan, R., Suyono, E., & Mafudi, M. (2017). Revitalization model for village unit cooperative in Indonesia.
- Kholidah, N., Hakim, M. R., & Purwanto, E. (2019). Analisis Kinerja Reksadana Saham Syariah Dengan Metode Sharpe, Treynor, Jensen, M², dan TT. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJIJE)*, 1(2), 29-40.
- Kholidah, N., & Salma, A. N. (2019). Filantropi kreatif: Pemberdayaan ekonomi umat berbasis zakat produktif pada program 1000 UMKM LAZISMU Kabupaten Pekalongan. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 14(2), 93-101.
- Azzahra, M., Yohani, Y., & Fatah, K. (2023). ANALISIS DAMPAK SEBELUM DAN DI SAAT PANDEMI COVID-19 TERHADAP HARGA SAHAM DAN LABA PERUSAHAAN SUB SEKTOR TRANSPORTASI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA. *Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo*, 9(1), 1-14.